



SPPT PBB 2026 DIBAGIKAN SEJAK AWAL TAHUN

## Dilengkapi 'QR Code', Mudahkan Pembayaran Berbasis Digital

**YOGYA (KR)** - Pemkot Yogya membagikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi Bangunan (PBB) tahun 2026 kepada wajib pajak sejak awal tahun. Salah satu yang membedakan dengan tahun-tahun sebelumnya ialah adanya 'QR Code' untuk tutorial dan Qris dinamis guna memudahkan pembayaran berbasis digital.

Walikota Yogya Hasto Wardoyo, mengaku dirinya memang mendorong agar sejak awal tahun berjalan layanan yang berkaitan dengan masyarakat sudah bisa diberikan. "Begitu memasuki Januari maka harus start, bukan lagi persiapan. Harapan saya memang SPPT ini bisa disampaikan lebih dini supaya masyarakat bisa mempersiapkan diri dan membayarkan lebih awal," urainya, di sela penyerahan SPPT PBB 2026, Jumat (2/1).

SPPT PBB 2026 tersebut diserahkan kepada masing-masing kelurahan yang selanjutnya disebarluaskan ke wajib pajak.

Total ada 97.801 lembar SPPT PBB dengan total nominal ketetapan sekitar Rp 167,7 miliar.

Pada kesempatan itu Hasto mengapresiasi SPPT PBB yang dilengkapi dengan 'QR Code' tutorial pembayaran, dan Qris dinamis untuk pembayaran secara digital. Hal ini lantaran wajib pajak akan dimudahkan dengan pembayaran PBB secara digital dengan scan QRIS. Namun demikian Hasto menegaskan Pemkot Yogya masih melayani pembayaran SPPT PBB secara tunai bagi masyarakat yang belum bisa mengakses pembayaran secara digital.

Selain itu dirinya juga menyoroti soal keadilan dalam pembayaran pajak. Hal itu terkait data objek PBB yang harus diperbarui dengan mengecek ulang di lapangan. Dicontohkan terkait adanya data objek pajak yang ditagihkan berbeda dengan di lapangan yang dimiliki wajib pajak. "Itu semua harus diharmonisasi. Ya ini terus menerus dilakukan di lapangan, diperiksa ulang," ujarnya.

Sementara itu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogya Raden Roro Andarini, membenarkan tutorial 'QR Code' dan Qris dinamis

menjadi hal pembeda dengan SPPT PBB tahun-tahun sebelumnya. Hal ini seiring kemudahan layanan pembayaran berbasis digital yang sudah familiar di masyarakat. "Ini akan menjadi salah satu program unggulan di Pemkot. Di mana masyarakat ketika menerima SPPT itu kapan pun mau bayar, sambil tiduran pun bisa, semudah kita belanja online. Harapannya nanti masyarakat dengan kemudahan pembayaran itu percepatan pembayarannya dapat segera dilaksanakan," terangnya.

Menurutnya permasalahan yang dihadapi dalam pemungutan PBB antara lain kecenderungan dalam pembayaran PBB mendekati saat jatuh tempo. Selain itu ada wajib pajak yang tidak tertib dalam pembayaran. Namun, pihaknya optimis peneri-



*Walikota Yogya secara simbolis menyerahkan SPPT PBB tahun 2026.*

maian PBB tahun bisa tercapai targetnya. Penerimaan PBB Kota Yogya pada 2025 lalu terealisasi sebanyak Rp 134,8 miliar atau melebihi target sebe-

sar 103,73 persen. Terkait adanya perbedaan data objek pajak PBB, diakuinya menjadi pekerjaan rumah sehingga BPKAD Kota Yogya akan

melakukan pendataan kembali objek pajak. Masyarakat juga diharapkan bisa melaporkan ke instansinya jika ada perubahan objek pajak. (Dhi)-f

| Instansi                | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut   |
|-------------------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Walikota<br>2. BPKAD | Netral       | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 06 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005